PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Selasa Tanggal: 31 Maret 2020 Halaman: 2

SIDANG PARIPURNA DEWAN TETAP BERJALAN

# Peserta Dibatasi, Gunakan Teleconference

**YOGYA (KR)** - Sidang paripurna sebagai rapat tertinggi di lembaga dewan tetap berjalan secara optimal. Hanya, protokol pencegahan penyebaran Covid-19 diberlakukan secara ketat. Terutama dengan membatasi peserta sidang serta penggunaan teleconference.

Pada Senin (30/3) sore ada dua agenda utama dalam sidang paripurna DPRD Kota Yogya. Yakni penetapan keputusan DPRD terkait pokok pikiran dewan, dan penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas LKPJ Walikota Tahun 2019.

"Ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri kami berlakukan, mengingat agenda paripurna kali ini sangat penting," tandas Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiyatmoko.

Sesuai ketentuan, setiap rapat maksimal hanya bisa diikuti oleh 30 orang. Sedangkan dalam tata tertib, sidang paripurna bisa berjalan ketika sudah dihadiri oleh 50 persen peserta plus satu dari total anggota dewan, atau 21 orang. Padahal dalam setiap sidang paripurna juga harus mengundang unsur kepala daerah serta pejabat eksekutif.

Oleh karena itu, imbuh Danang, pihaknya membatasi peserta sidang masing-masing fraksi hanya mewakilkan dua orang anggotanya. Sedangkan anggota fraksi lainnya, wajib hadir di dewan namun memantau jalannya sidang melalui teleconference. "Unsur dari eksekutif juga kami batasi hanya kepala daerah dan jajaran sekda serta perwakilan dari OPD yang serumpun. Jadi tidak semua OPD. Dari sisi kuota juga tercapai karena anggota fraksi lainnya memantau lewat video di gedung dewan dari ruang fraksinya masing-masing," urainya.

Dua agenda dalam sidang paripurna pun harus digelar karena berhubungan dengan kepentingan publik. Pertama, pokok pikiran dewan kaitannya dengan musrenbang tingkat kota yang akan digelar pekan ini. Kemudian rekomendasi LKPJ Walikota Tahun 2019 yang harus diserahkan maksimal 30 hari kerja setelah LKPJ disampaikan. LKPJ itu disampaikan sejak 25 Februari lalu sehingga batas akhirnya ialah 3 April 2020.

Danang menjelaskan, baik pokok pikiran dewan maupun rekomendasi atas LKPJ berkaitan erat dengan pembahasan RAPBD 2021 maupun perubahan anggaran tahun ini. "Penanganan Covid-19 memang harus menjadi prioritas. Tetapi agenda yang itu berkaitan dengan publik, diupayakan bisa berjalan dengan mendasarkan pada protokolnya," tandasnya.

Sementara itu DPRD DIY juga melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkup lembaga legislatif tersebut. Salah satu upayanya adalah penerapan *physical distancing* (jaga jarak fisik), dengan melakukan rapat-rapat Komisi dan Pansus secara *teleconference* untuk menggantikan pertemuan fisik.

"Semua rapat-rapat Dewan seperti di Komisi dan Pansus dilakukan dengan *teleconference*. Kecuali nanti kalau rapat untuk memutuskan sesuatu yang strategis, terpaksa kumpul secara fisik. Untuk Rapat Paripurna (Rapur) dan pertemuan besar semua kita tunda dulu," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana kepada *KR*, Senin (30/3).

Pimpinan Dewan (Pimwan) juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Dewan untuk melakukan kunjungan dalam daerah setiap hari. Kegiatan terjun ke lapangan ini dilakukan secara mandiri oleh individu, tidak dalam kelompok.

"Sebanyak 55 anggota Dewan melakukan kunjungan secara sendiri-sendiri, mereka diterjunkan ke seluruh kabupaten/kota, sehingga bisa mengerti kondisi masyarakat secara riil," katanya.

(Dhi/Bro)-o

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Sekretariat DPRD Kota | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005